

## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGADA SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN

**Maria Fransiska Wist Towa**

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur  
Email: wimmy\_fransiska@yahoo.co.id

**Abdul Halim**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Email: abhalim58@yahoo.com

### Abstract

*This research is to analyze the local financial capability of Ngada Regency before and after the expansion by measuring and analyzing local financial capacity indicated by Fiscal Autonomy Degree (DOF), Routine Capacity Index (IKR) and PAD Performance Index (IPPAD). It is also analyze the correlation between local financial capability with the economic development of Ngada Regency. The data used in this research was secondary data in the form of time series with the observation period was from 2002 to 2011. The analysis tools to answer the research's purpose were the indicator of local financial capability through Fiscal Autonomy Degree (DOF), Routine Capacity Index (IKR) and PAD Performance Index (IPPAD), paired samples test and pearson correlation. The research finding showed that the local financial capability of Ngada Regency was still low, where the Fiscal Autonomy Degree (DOF) was very less because the ratio is < 10 percent, Routine Capacity Index (IKR) had shortage since it is < 20 percent and the ratio of PAD Performance Index (IPPAD) was poor because IPPAD was < 1. There was a significant difference of the local financial capability between before and after the expansion of Ngada Regency showed by Fiscal Autonomy Degree (DOF). There was no correlation between the indicators of local financial capability (DOF, IKR and IPPAD) with the indicators of economic development through the indicator of GDP's Ngada Regency.*

**Keywords:** local financial capability, expansion, pairs sample test, pearson correlation.

### PENDAHULUAN

Peralihan rezim pemerintahan Indonesia dari orde baru menuju orde reformasi pada pertengahan tahun 1998 telah melahirkan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Otonomi daerah ditanggapi daerah dengan memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah sebagaimana telah diganti dengan PP Nomor 78 tahun 2007 perihal yang sama. Ada beberapa

alasan yang diajukan oleh daerah untuk mendukung pemekaran (Bappenas dan UNDP, 2008: 2), antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan.

Pada akhir tahun 2006 Kabupaten Ngada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Ngada (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Nagekeo sebagai Kabupaten Pemekaran atau Daerah Otonom Baru (DOB). Kabupaten Nagekeo resmi

berdiri pada tanggal 8 Desember 2006 dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 2 Januari 2007 dengan Mbay sebagai ibukotanya yang terdiri atas 7 kecamatan, sedangkan Kabupaten Ngada sebagai Kabupaten Induk terdiri atas 9 kecamatan.

Pada prinsipnya pemekaran wilayah tidak boleh mematikan kabupaten induk. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah harus ditingkatkan seoptimal mungkin, dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal baik itu kabupaten pemekaran maupun kabupaten induknya. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada bantuan dan subsidi dari Pemerintah Pusat. Meskipun disadari bahwa sebagian besar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya kecil sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada dari tahun 2002-2011 masih sangat rendah rata-rata, yakni hanya 4,29 persen dari total APBD Kabupaten Ngada. Kontribusi PAD terbesar pada tahun 2011 (sesudah pemekaran) sebesar 5,62 persen yang didominasi oleh retribusi daerah sebesar Rp. 12.347.225.000, disusul lain-lain PAD yang sah Rp. 9.340.438.000, pajak daerah Rp. 2.628.353.000, dan laba BUMD Rp. 2.596.015.000. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Kuncoro (1995) bahwa selama kurun waktu 1984/1985–1990/1991 untuk daerah propinsi PAD rata-rata hanya mampu membiayai 30 persen dari pengeluaran rutin dan untuk daerah kabupaten/kota kurang dari 22 persen pengeluaran rutin mampu dibiayai oleh PAD.

Kecilnya sumbangan PAD pada APBD menunjukkan semakin besar ketergantungan daerah kepada pusat. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal maka pemerintah Kabupaten Ngada sangat bergantung pada dana transfer dari

pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Rata-rata proporsi dana perimbangan terhadap total penerimaan APBD Kabupaten Ngada dari tahun 2002-2011 sebesar 78,87 persen. Hal ini menunjukkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah dan kuatnya peran pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah melalui angka ketergantungan fiskal dalam alokasi anggaran.

Permasalahan yang muncul adalah hingga sampai saat ini (setelah pemekaran) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada masih rendah. Proporsi pendapatan Kabupaten Ngada yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) jumlahnya kecil sehingga menciptakan ketergantungan pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu harus ada upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dalam daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tulisan ini bertujuan mengukur dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada Selain itu, menganalisis perbedaan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah, dan menganalisis hubungan antara kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa ukuran untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: 1. kemampuan struktural organisasinya; 2. kemampuan aparatur pemerintah daerah (SDM); 3. kemampuan keuangan daerah; 4. kemampuan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Bab II pasal 2 PP 129 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, disebutkan tujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui: 1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; 3. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; 4. percepatan pengelolaan potensi daerah; 5. peningkatan keamanan dan ketertiban; 6. peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Otonomi daerah sangat erat dengan kemampuan keuangan daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Keuangan daerah diartikan Mamesah (1995: 16) sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku.

Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak atau Bagi Hasil Pajak (BHP) dan dana bagi hasil yang bersumber Sumber Daya Alam (SDA) atau Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (BHPBP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah menurut Halim (2007: 262) adalah pertama, kemampuan keuangan daerah artinya daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; kedua, ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat diukur melalui kemampuan keuangan daerah dengan menganalisis: 1. derajat desentralisasi fiskal

adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri kepada pemerintah pusat; 2. kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum; 3. kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan DBH; 4. upaya fiskal adalah koefisien elastisitas PAD dengan PDRB; 5. kebutuhan fiskal standar adalah rata-rata kebutuhan fiskal standar suatu daerah.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada periode sebelumnya. Hal ini maksudnya perkembangan baru akan terjadi apabila jumlah *output* barang-barang yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut volumenya meningkat pada periode-periode berikutnya. Laju pertumbuhan ekonomi diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi diukur melalui perkembangan PDRB dari tahun ke tahun (Widodo, 1990: 35).

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, PAD sebagai sumber pendapatan daerah komponennya terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, Insukindro dkk (1994: 1) mengemukakan bahwa PAD dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Semakin besar sumbangan PAD kepada APBD menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan uraian permasalahan dan tinjauan pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder runtun waktu (*time series*) selama periode tahun 2002-2011. Data sekunder tersebut diperoleh melalui Dinas PPKAD Kabupaten Ngada, Bapeda Daerah Kabupaten Ngada, BPS Kabupaten Ngada dan instansi lain yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder meliputi realisasi penerimaan APBD Kabupaten Ngada, realisasi belanja rutin Kabupaten Ngada, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten Ngada, realisasi PAD dan PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator kemampuan keuangan daerah, uji beda sampel berpasangan (*pairs sample test*) dan korelasi Pearson. Ketiga alat analisis itu akan diuraikan sebagai berikut.

**Indikator kemampuan keuangan daerah**

Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan ekonomi daerah dapat diukur melalui indikator

kemampuan keuangan daerah. Dengan berpedoman pada hasil penelitian Litbang Depdagri dengan Fisipol UGM (1991) dalam mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah maka ada 3 (tiga) indikator yaitu (lihat Munir et al, 2004: 106).

**Derajat Otonomi Fiskal (DOF)**

DOF menjelaskan tentang nisbah antara penerimaan daerah yang berasal dari komponen PAD dan Total Penerimaan Daerah (TPD) yang dinyatakan dalam APBD setiap tahunnya dengan rumus sebagai berikut (Munir et al 2004: 106):

$$DOF = \frac{PAD_t}{APBD_t} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Makin tinggi persentase DOF maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan ekonominya berdasarkan sumber-sumber keuangan asli daerah. Sebaliknya semakin kecil rasionya, maka daerah tersebut semakin tinggi tingkat ketergantungan kepada pusat. Adapun rasio DOF dinyatakan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1 Skala Interval Derajat Otonomi Fiskal

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
< 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Munir et al (2004: 106).

**Indeks Kemampuan Rutin (IKR)**

IKR digunakan untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dapat memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001: 22) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKR_t = \frac{PAD_t}{TPR_t} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

di mana  $TPR_t$  adalah total pengeluaran rutin pada tahun t.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah maka menunjukkan kemampuan

membayai kebutuhan rutinnya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat dan juga menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang positif. Kriteria Indeks Kemampuan Rutin (IKR) suatu daerah dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

PAD/Total Pengeluaran Rutin (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 20,00	Sangat Kurang
20,01 – 40,00	Kurang
40,01 – 60,00	Cukup
60,01 – 80,00	Baik
80,01 – 100,00	Sangat Baik

Sumber : Munir (2004: 106)

**Indeks Penampilan PAD (IPPAD)**

Kemampuan keuangan daerah sangat didukung oleh usaha daerah dalam memungut PAD (*fiscal effort*). Akan tetapi potensi tiap daerah berbeda di mana daerah yang sumber pendapatannya besar tingkat kemandiriannya besar pula. Menurut Hikmah (1999) karena data di daerah tidak mendukung maka dipakai berbagai proxy untuk mengukur upaya fiskal (*fiscal effort*) dengan rumus sebagai berikut (lihat Reksohadiprodjo, 2000: 200-204).

$$IPPAD = \frac{UPPAD_j}{TPAD_s} \dots\dots\dots (3)$$

di mana :

Upaya pemungutan PAD di daerah *j* (*UPPAD<sub>j</sub>*):

$$UPPAD_j = \frac{PAD_j}{Kapasitas\ atau\ potensi\ PAD} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

atau :

$$UPPAD_j = \frac{PAD_j}{PDRB_j\ (tanpa\ Migas)} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

Tingkat PAD Standar (*TPAD<sub>s</sub>*) :

$$TPAD_s = \frac{\sum PAD\ Kabupaten/Kota}{\sum PDRB\ (tanpa\ Migas)\ Kabupaten/Kota} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

di mana :

$\sum PAD$  : Total PAD Kabupaten/kota se-Propinsi NTT

$\sum PDRB$  : Total PDRB Kabupaten/kota se-Propinsi NTT

Indeks Penampilan PAD (IPAD) berdasarkan penelitian Ahmad (1990: 66) dinilai dengan kriteria: 1. apabila IPPAD <1, maka posisi PAD Kabupaten Ngada adalah lemah karena berada dibawah tingkat PAD standar kabupaten; 2. apabila IPPAD >1, maka posisi PAD Kabupaten Ngada adalah kuat karena berada di atas tingkat PAD standar kabupaten.

**a. Uji beda sampel berpasangan (*pairs samples test*)**

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *before and after analysis*. Untuk menguji ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada perubahan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah maka digunakan analisis uji beda sampel bukan sampel independen (Saleh, 2001: 216) atau uji beda sampel berpasangan (*pairs samples test*) (Djarwanto dan Subagyo, 2005: 203). Untuk memudahkan pengujian secara statistik maka disusun hipotesis statistik sebagai berikut:

*Ho* : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

*Ha* : terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

Berdasarkan hipotesis tersebut maka dapat diambil keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis sebagai berikut: 1. jika probabilitas dari *p value* (Sig. t) > 0,05 maka *Ho* di terima. *Ho* diterima artinya kemampuan keuangan daerah antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah Kabupaten Ngada adalah sama atau tidak terdapat perbedaan secara nyata; 2. jika probabilitas dari *p value* (Sig. t) < 0,05 maka *Ho* ditolak. *Ho* ditolak artinya kemampuan keuangan daerah antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah Kabupaten Ngada adalah tidak sama atau terdapat perbedaan secara nyata.

**b. Korelasi pearson**

Korelasi pearson digunakan untuk menganalisis tinggi rendahnya derajat hubungan antara kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dan Indeks Penampilan PAD (IPPAD) dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Ngada. Hubungan antara variabel x dan y berkorelasi positif menunjukkan bahwa perubahan variabel x dan y adalah searah, sedangkan tinggi rendahnya keeratan tersebut ditentukan oleh koefisien korelasinya. Bila +1 berarti hubungan kedua variabel sangat erat dan positif, bila nilai koefisien korelasi semakin mendekati nol berarti hubungan kedua variabel tersebut sangat lemah. Bila perubahan variabel x dan y saling berlawanan maka akan berkorelasi negatif, sehingga memiliki koefisien korelasi yang negatif. Koefisien korelasi negatif bukan berarti bahwa hubungan kedua variabel tersebut lemah tapi hanya menunjukkan perubahan yang berlawanan arah antara variabel-variabel tersebut (Saleh, 2004: 129-130). Rumus koefisien korelasi sebagai berikut:

$$r = \frac{[n\sum XY] - [\sum X][\sum Y]}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}} \dots\dots\dots (7)$$

Di mana:

- r = Koefisien korelasi
- X<sub>i</sub> = Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada
- Y = Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada
- n = Jumlah observasi

Menurut Young (1982) dalam (Djarwanto dan Subagyo, 2005: 301) koefisien korelasi 0,70 sampai 1,00 (plus dan minus) menunjukkan adanya derajat asosiasi yang tinggi. Koefisien korelasi lebih tinggi dari 0,40 sampai di bawah 0,70 maka menunjukkan hubungan yang substansial. Apabila koefisiennya di atas 0,20 sampai di bawah 0,40 menunjukkan adanya korelasi yang rendah dan apabila kurang dari 0,20 dapat diabaikan.

Setelah dilakukan perhitungan terhadap r, maka dilakukan uji signifikansi dari r (koefisien

korelasi) dengan prosedur pengujian sebagai berikut.

1. Analisis hipotesis korelasi
  - H<sub>0</sub> : r<sub>xy</sub> = 0 maka tidak ada hubungan antara variabel x dan y
  - H<sub>0</sub> : r<sub>xy</sub> > 0 maka ada hubungan antara variabel x dan y
2. Derajat kepercayaan (*level of significant*) = 0,05 persen
3. Kriteria pengujian:
  - H<sub>0</sub> diterima bila t tabel lebih besar atau sama dengan t hitung.
  - H<sub>0</sub> ditolak bila t tabel lebih kecil atau sama dengan t hitung.
4. Hasil pengujian untuk sampel kecil (n<30) dapat diuji dengan menggunakan distribusi nilai t\*

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \dots\dots\dots (8)$$

**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Berikut dikemukakan analisis atas data beserta pembahasan. Berturut-turut dikemukakan tentang indikator keuangan, perbedaan kemampuan keuangan, dan hubungan dengan indikator pertumbuhan ekonomi.

**Indikator kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada**

Tabel 3 berikut menyajikan data terkait dengan kemampuan keuangan daerah. Indikator tersebut meliputi Derajat Otonomi Fiskal, Indek Kemampuan Rutin, dan Indek Penampilan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai salah satu indikator kemampuan keuangan daerah, hasil perhitungan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Ngada sesuai tabel 3 selama periode 2002-2011 rata-rata sebesar 4,39 persen. Ini berarti sesuai skala interval berada pada kategori sangat kurang (lihat tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang dan mengandalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat.

Tabel 3 Indikator Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada, 2002-2011 (Dalam Persen)

No	Tahun	Indikator Kemampuan Keuangan		
		DOF	IKR	IPPAD
1	2002	3,81	8,00	0,04
2	2003	4,43	6,59	0,06
3	2004	3,69	6,11	0,13
4	2005	3,88	6,39	0,12
5	2006	4,14	7,61	0,30
6	* 2007	4,11	6,96	0,28
7	*2008	5,58	8,36	0,25
8	*2009	4,22	7,80	0,22
9	*2010	4,04	8,90	0,21
10	*2011	5,62	9,43	0,21
<b>Rata-rata</b>		<b>4,39</b>	<b>7,68</b>	<b>0,17</b>

\*Sesudah pemekaran wilayah

Tidak jauh berbeda dengan DOF, Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang merupakan proporsi PAD terhadap kemampuan membiayai belanja rutin Kabupaten Ngada rata-rata sebesar 7,68 persen selama tahun 2002-2011 persen berada pada kategori sangat kurang sesuai skala interval IKR. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Ngada masih sangat tinggi pada Pemerintah Pusat.

Usaha daerah dalam meningkatkan penerimaan dari PAD dapat dipandang sebagai upaya fiskal daerah (*fiscal effort*), walaupun potensi tiap daerah berbeda. Kondisi IPPAD Kabupaten Ngada kategorinya lemah dengan rata-rata 0,17 persen (lihat tabel 3) berada di bawah standar PAD tingkat Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (IPPAD <1). Artinya selama periode pengamatan pertumbuhan ekonomi tidak mampu mendorong peningkatan PAD sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi

Pemerintah Kabupaten Ngada untuk meningkatkan upaya pemungutan PAD. PAD Kabupaten Ngada jauh lebih rendah dibanding PAD kabupaten lain di wilayah Provinsi NTT dan berada di bawah standar PAD Provinsi NTT.

Perbedaan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah

#### 1. Perbedaan berdasarkan Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Untuk menguji ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada perubahan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah maka digunakan analisis uji beda sampel bukan sampel independen. Hasil perbandingan DOF sebelum dan sesudah pemekaran sebagai berikut:

Tabel 4 Uji T Berpasangan DOF Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah kabupaten Ngada, 2002-2011

	Paired Differences					T	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 DOF Sebelum Pemekaran- DOF Sesudah Pemekaran	-.85000	.51764	.23150	-1.4927	-.20727	-3.672	4	.021

Berdasarkan hasil pengujian sesuai tabel 4 diketahui bahwa perbandingan rasio keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran secara rata-rata terjadi kenaikan sebesar 0.85000. Hal

yang signifikan antara Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah Kabupaten Ngada.

Tabel 5 Uji T Berpasangan IKR Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah Kabupaten Ngada, 2002-2011

	Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 IKR Sebelum Pemekaran - IKR Sesudah Pemekaran	-1.3500	1.3757	.61525	-3.05820	.35820	-2.194	4	.093

ini berarti secara statistik terjadi perbedaan yang signifikan antara Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Ngada karena *sig. (2-tailed)* sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara DOF Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah Kabupaten Ngada.

## 2. Perbedaan berdasarkan Indeks Kemampuan Rutin (IKR).

Hasil pengujian kedua sesuai tabel 5 diketahui bahwa perbandingan rasio keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran secara rata-rata terjadi kenaikan sebesar 1,3500. Hal

## 3. Perbedaan berdasarkan Indeks Penampilan PAD (IPPAD).

Hasil pengujian ketiga sesuai tabel 6 diketahui bahwa perbandingan rasio keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran secara rata-rata terjadi kenaikan sebesar 0.10200. Hal ini berarti secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara Indeks Penampilan PAD (IPPAD) sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Ngada karena *sig. (2-tailed)* sebesar 0,139 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Indeks Penampilan PAD (IPPAD) Kabupaten Ngada sebelum dan sesudah pemekaran wilayah Kabupaten Ngada.

Tabel 6 Uji T Berpasangan IPPAD Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah Kabupaten Ngada, 2002-2011

	Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 IPPAD Sebelum Pemekaran - IPPAD Sesudah Pemekaran	-.10200	.12377	.05535	-.25569	.05169	-1.843	4	.139

ini berarti secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara Indeks Kemampuan Rutin (IKR) sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Ngada karena *sig. (2-tailed)* sebesar 0,093 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan

## Hubungan kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada

Analisis hubungan kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk mengetahui adanya keterkaitan antara

kemampuan keuangan daerah (DOF, IKR dan IPPAD) dengan pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ngada. Hasil perhitungan dengan alat analisis korelasi pearson dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kemampuan keuangan daerah baik DOF, IKR maupun IPPAD dengan pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ngada. Hal ini mungkin

Tabel 7 Hubungan Indikator Kemampuan Keuangan Daerah (DOF, IKR, IPPAD) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Ngada, 2002-2011

		DOF	IKR	IPPAD	PDRB
DOF	Pearson Correlation	1	.523	.435	.001
	Sig. (2-tailed)		.121	.209	.999
	N	10	10	10	10
IKR	Pearson Correlation	.523	1	.352	.227
	Sig. (2-tailed)	.121		.318	.529
	N	10	10	10	10
IPPAD	Pearson Correlation	.435	.352	1	.177
	Sig. (2-tailed)	.209	.318		.624
	N	10	10	10	10
PDRB	Pearson Correlation	.001	.227	.177	1
	Sig. (2-tailed)	.999	.529	.624	
	N	10	10	10	10

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi pearson DOF dengan PDRB adalah sebesar 0,001 dengan nilai *P-value* sebesar 0,999. Hasil ini berarti hubungan tersebut tidak signifikan karena nilai *P-value* (0,999) lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara DOF dengan PDRB Kabupaten Ngada.

Koefisien korelasi antara IKR dengan PDRB adalah sebesar 0,227 dengan nilai *P value* 0,529. Ini berarti hubungan tersebut tidak signifikan karena nilai *P-value* lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara IKR dengan PDRB Kabupaten Ngada.

Koefisien korelasi antara IPPAD dengan PDRB adalah sebesar 0,177 dengan nilai *P-value* 0,624. Ini berarti hubungan tersebut tidak signifikan karena nilai *P-value* lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara IPPAD dengan PDRB Kabupaten Ngada.

terjadi karena pendapatan daerah Kabupaten Ngada yang relatif masih sangat kecil.

## SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

### Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Indikator kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada selama periode pengamatan tahun 2002-2011 menunjukkan bahwa Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Ngada selama periode pengamatan tahun 2002-2011 rata-rata 4,39 persen berada pada kategori sangat kurang karena berada antara rasio < 10,00 persen dengan nilai berkisar 3,69 sampai 5,62 persen. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) selama periode pengamatan tahun 2002-2011 rata-rata sebesar 7,68 persen berada pada kategori sangat kurang karena berada antara rasio 0,00 – 20,00 persen dengan nilai berkisar 6,11 persen sampai 9,43 persen.

Indeks Penampilan PAD (IPPAD) Kabupaten Ngada selama periode pengamatan tahun 2002-2011 rata-rata sebesar 0,17 persen. Angka ini menunjukkan posisi PAD Kabupaten Ngada lemah karena IPPAD < 1 berada di bawah standar PAD Kabupaten/kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah antara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Ngada yang ditunjukkan oleh Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah membawa perubahan bagi peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada melalui indikator Derajat Otonomi Fiskal (DOF).

Tidak ada hubungan antara indikator kemampuan keuangan daerah (DOF, IKR dan IPPAD) dengan pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB Kabupaten Ngada.

#### Saran

Berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan daerah yang telah diuraikan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Ngada diharapkan dapat melakukan upaya konkrit untuk meningkatkan PAD melalui langkah-langkah: Mendata dan menghitung potensi riil PAD dengan menggunakan metoda penghitungan yang tepat dan benar,

meningkatkan kinerja BUMD untuk memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi agar mampu menyumbang penerimaan bagi pemerintah daerah, dan membuka akses informasi yang luas untuk memperkenalkan potensi-potensi unggulan di wilayah Kabupaten Ngada sebagai sumber penerimaan daerah seperti potensi pertanian (jagung, kopi, kakao, jambu mete) dan potensi pariwisata (kampung adat Megalitikum Bena, Taman Laut 17 Pulau Riung, pemandian air panas Soa).

Pemerintah Kabupaten Ngada harus meningkatkan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dengan mengoptimalkan pemungutan melalui pendataan kembali wajib pajak dan obyek pajak yang sudah ada, efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, menggiatkan kembali program wajib pajak “bulan masyarakat sadar membayar pajak” melalui kearifan lokal masyarakat setempat.

#### Keterbatasan

Penelitian ini tentu mempunyai keterbatasan. Masalah data adalah keterbatasan utama. Data yang relatif sedikit yang hanya mencakup 10 tahun menjadi kelemahan dari sisi kuantitatif. Keterbatasan lain yang juga dapat dikemukakan adalah analisis yang relatif masih sederhana, mengingat masih cukup langkanya penelitian terkait masalah ini di Indonesia.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jammaludin (1990), “Hubungan Keuangan Antarpemerintah Pusat-Daerah, Studi Kasus D.I. Aceh, Jawa Timur dan DKI Jakarta”, *Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi*, UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan UNDP (2008), *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah Tahun 2001-2007*, Edisi Juli 2008, Jakarta: BRIDGE.
- Djarwanto dan Subagyo, Pangestu (2005), *Statistik Induktif*, Edisi Keempat, Cetakan Kelima, Yogyakarta: BPFE.
- Halim, Abdul (2007), *Bunga Rampai Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Insukindro, Mardiasmo, Widayat W., Jaya W.K., Purwanto, B.M., Halim A., Suprihanto, J., Purnomo, A.B. (1994), “Peran dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD”, *Laporan Penelitian*, KKD, FE-UGM, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad (1995), “Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan”, *Prisma*, No. 4, Vol. 24, 3-18.

- Mamesah, D.J. (1995), *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mangkoesebroto, Guritno (2001), *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPF.
- Munir, Dasril, Henry A. Djuanda dan Hessel H.N. Tangkilisan (2004), *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: YPAPI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Reksohadiprojo, Sukanto (2000), *Ekonomika Publik*, Yogyakarta: BPF.
- Saleh, Samsubar (2001), *Statistik Induktif*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_ (2004) *Statistik Deskriptif*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Widodo, ST. (1990), *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.